



PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3APPKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam;
7. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Dan Pembangunan Daerah Kota Batam.
8. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan Gender Analysis

Pathway yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.

6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Renja SKPD dan Renstra-SKPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
8. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
9. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
10. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KRITERIA

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan capaian pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan termasuk lansia, anak dan disabilitas di berbagai sektor pembangunan.

#### Pasal 4

Kriteria perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada SKPD adalah sebagai berikut:

- a. memiliki daya ungkit besar untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender;
- b. memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian MDGs dan SDGs;
- c. berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Daerah;
- d. berhubungan dengan pelayanan publik; dan
- e. memperkuat pelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian dan pengumpulan data terpilah.

#### BAB III

#### Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

#### Pasal 5

- (1) Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD yang responsif gender difokuskan pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender (GAP) kemudian dituangkan dalam dokumen Pernyataan Anggaran Gender (GBS).
- (3) Dokumen Rencana Kegiatan SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB IV

#### PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) SKPD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG satu kali dalam satu tahun kepada Bappelitbangda dengan tembusan kepada DP3APPKB.
- (2) Bappelitbangda melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Walikota Batam sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG di Daerah.

#### Pasal 7

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat antara lain:

- a. gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG;
- b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya;
- c. analisis;
- d. kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG;
- e. para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan; dan
- f. rencana aksi tahun mendatang.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 568) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 1 Februari 2019

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 6 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF  
 GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DOKUMEN RENCANA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA SKPD	PROGRAM	NAMA KEGIATAN
1	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum Perkotaan
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penataan, Pembinaan dan Pengembangan IKM di Kota Batam	1. Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Batam (DEKRANASDA)
			2. Pembinaan dan Pengembangan IKM di Kota Batam
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Penertiban Rumah Liar dan Kios di Lahan Milik Pemerintah
			2. Operasi Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam
4	Dinas Lingkungan Hidup	Program Lingkungan Sehat	Pengelolaan Lingkungan dan 3R
5	Dinas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja
			2. Pelatihan Kewirausahaan
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	Pengelolaan Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			2. Bimtek Penerapan Peraturan Kepegawaian

7	Inspektur Daerah Kota Batam	Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas APIP
8	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	1. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM, dan Koperasi Serta Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Sosialisasi Permodalan KUKM Kota Batam
		2. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM, dan Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat	2. Penataan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
9	Dinas Pendidikan Kota Batam	Wajib Belajar Pendidikan Dasar	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 001 Batu Aji
			2. Pembangunan Toilet/ WC /Sekolah
			3. Pembangunan RKB SD
		Wajib Belajar Pendidikan Menengah	1. Pembangunan RKB SMP
			2. Pembangunan USB SMP
10	Dinas Perikanan	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan	Pembinaan Mutu dan Ragam Produk Pengolahan Hasil Perikanan
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan	1. Promosi Penanaman Modal
			2. Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas
			3. Penyelenggaraan Perizinan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sosial
12	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam	Program Penanganan dan Penanggulangan kebakaran	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Kebakaran

			2. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
			3. Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
			4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1. Operasional Perpustakaan Keliling Kota Batam
			2. Lomba Minat Baca Melalui Mendongeng, Pidato dan Cerdas Cermat
14	Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, dan Pertamanan Kota Batam	Peningkatan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Batam	1. Peningkatan dan Penataan Taman Kota
15	Dinas Kesehatan Kota Batam	1. Upaya Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1. Perbaikan Gizi Masyarakat
		2. Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat	2. Peningkatan Kesehatan Keluarga
16	Dinas Perhubungan Kota Batam	1. Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal	1. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam
			2. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah
			3. Operasional Jasa Transportasi Laut
		2. Program Pembangunan Peningkatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
17	Sekretariat DPRD Kota Batam	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama



18	Dinas Pertanahan	Penataan Tata Guna Tanah	Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua
19	BAPELITBANGDA	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RKPD Kota Batam
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengembangan Agrobisnis Pertanian Sektor Unggulan
21	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	1. Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/ Pelantar	1. Penataan Jalan Simp. Patung Kuda- Simp Bengkong seken
			2. Penataan Jalan (Pelebaran Jalan) Simp. Kabil-Simp. Masjid Agung Batam Centre
			3. Penataan Jalan Simp. Baloi Centre-Simp. Apartemen Harmoni (Lanjutan)
			4. Peningkatan Jalan Simp. Apartemen Harmoni-Simp. Irinco-Simp. Polsek Lubuk Baja
			5. Peningkatan Jalan Simp. Baloi Centre-Simp. Kampung Nelayan
			6. Peningkatan Jalan Simp. Polsek Lubuk Baja-Simp. Baloi Centre
			7. Penataan Jalannn Simp. Jam-Simp. BNI/ Rosedale (Lanjutan)
			8. Penataan Jalan Simp. Planet Holiday-Simp. The Hill Hotel (Lanjutan)
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1. Pembangunan Lampu PJU Wilayah I Kota Batam
			2. Pembangunan Lampu PJU Wilayah II Kota Batam
			3. Pembangunan Lampu PJU Wilayah III Kota Batam
			4. Pemeliharaan Lampu PJU Kota Batam

22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penataan Administrasi Kependudukan	1. Pelayanan Administrasi Kependudukan (Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
			2. Pelayanan Administrasi Kependudukan (Pelayanan Pencatatan Sipil Akta Kelahiran)
		2. Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Pembangunan Kantor Pelayanan)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Publikasi Penyelenggara Pembangunan Daerah
		2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan	1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		2. Program Pengembangan dan Partisipasi Budaya Politik	2. Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol
25	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Bimbingan dan Keterampilan PMKS
			2. Pelayanan Sosial bagi Anak dan Lanjut Usia
26	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan, Pembukaan dan Pelayanan Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga	1. Penyelenggaraan Paskibraka
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	1. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Seni dan Budaya

		2. Program Pengembangan Sektor Pariwisata	2. Kegiatan Pengembangan Aktualisasi Minat dan Bakat Marching Band Kota Batam
28	RSUD Embung Fatimah	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
		2. Program Peningkatan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1. Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan
		2. Peningkatan Kualitas Hidup,Perlindungan Perempuan dan Anak	2. Pembinaan Organisasi Perempuan
30	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2. Sosialisasi Pajak Daerah
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Penyusunan APBD Kota Batam
			2. Penyusunan APBD Kota Batam
			3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI